

**PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM (Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HENDRA SEPTA SETIAWAN

C100110176

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
'Aisyiyah Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HENDRA SEPTA SETIAWAN

C100110176

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
'Aisyiyah Jawa Tengah)**

**OLEH
HENDRA SEPTA SETIAWAN
C100110176**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 23 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Hartanto, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

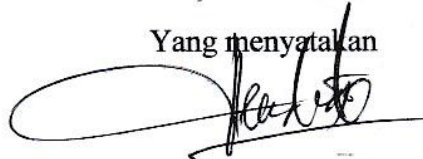
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Desember 2020

Yang menyatakan



HENDRA SEPTA SETIAWAN

C100110176

PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi dan kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berakitan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu berdasarkan pada: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, (4) UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (5) UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan (7) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi antara lain: (1) Kekurangtahuan masyarakat tentang masalah hukum yang menyimpannya, (2) Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan (3) Anggaran pembiayaan yang belum memadai.

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, non-ligitasi, masyarakat miskin

Abstract

The study aims to determine the juridical review of the implementation of non-litigation legal assistance and the constraints faced in mentoring non litigation settlements. The method of approach used in this research is a descriptive method of empirical approaches. The data source used is primary data, which is the result of interviews with the related parties and secondary data in the form of prevailing laws and regulations. Data collection techniques with literature studies and interviews. Data analysis methods use qualitative data analysis methods. The results show that the juridical basis for the implementation of non-litigation legal assistance is based on: (1) The Law of the Republic of Indonesia No. 16, 2011 about legal aid for the recipient of legal assistance in which it is a person or group of poor people who face legal issues, (2) The Law of the Republic of Indonesia No. 48 year 2009 on Judicial authority, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 49 Year 2009 on General Court, (4) Law RI No. 50 year 2009 on Second Amendment to LAW No. 7 year 1989 on religious Justice, (5) ACT No. 51 year 2009 About State Administration Judiciary, (6) Law of the Republic of Indonesia No. 18 year 2003 on Advocate, and (7) Law No. 8 year 1981 on the Code of Criminal proceedings. Furthermore, the constraints faced in mentoring non-litigation solutions include: (1) The Kekurangtahuan of society on the legal issues that override it, (2) Human resources are still lacking, both quality and quantity, and (3) Insufficient financing budget.

Keywords: legal aid agencies, non-ligitation, poor people

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah: (1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; (2) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak; dan (3) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya (Kaelan dan Zubaidi, 2007).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaat dirampas atau dicabut. “Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum. Namun, prinsip ini sering kali tidak terpenuhi karena berbagai alasan, seperti status sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau miskin, supaya mendapatkan keadilan (Ahmad, dkk., 2009).”

UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. “UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa saja dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Nusantara, 2011).”

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan, sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena itu, orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam

maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. “Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.” Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa “bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (Stbl. 1941 No. 44). Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah “perubahan sistem atau pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia (Sari Haryanto, 2014).”

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan

hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa “satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka (Atmasasmita, 1996)”.

Setelah berlakunya KUHAP, sistem atau pola pemeriksaan berubah menjadi sistem akusatur (*accusatoir*). Sistem atau pola pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek (Harahap, 2007)”.

Hak-hak orang yang tersangkut perkara pidana maupun perdata termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Telah disebutkan dalam Pasal 55 “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Ayat (1) Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Dalam ketentuan ayat (2) setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan

tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*) (Diah, 2014).

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaanya”.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa: “Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celaknya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin” (Harianto, 2009).

Selanjutnya, Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa: “Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal council*) yang memadai dari advokat (penasehat hukum). Frans Hendra Winarta juga menegaskan bahwa, pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono public*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hokum (Winarta, 2000).”

“Faktanya, penggunaan jasa advokat tentu membutuhkan biaya dan ini menjadi hal yang sulit untuk dipenuhi bagi orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Gede Agung Wirawan Nusantara menyatakan bahwa: “Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat

contohnya pada peradilan pidana yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi maupun bantuan hukum baik bersifat litigasi yaitu proses bantuan hukum yang beracara di pengadilan maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum kepada masyarakat yang dilakukan di luar proses beracara di pengadilan, yaitu seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya (Nusantara, 2011).”

Advokad seharusnya bertindak secara cuma-cuma untuk mendampingi *client*. Begitu juga bagi masyarakat miskin apabila memerlukan bantuan hukum dalam pendampingan perkara pidana seharusnya tidak dipungut biaya. Sehingga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi jalan keluar bagi masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara pidana. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia miskin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi.

2. METODE

Penelitian ini penulis termasuk penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan pendekatan empiris (implementasi atau penerapan di masyarakat) (Kusuma, 1995). Jenis penelitian ini deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan

dengan hasil observasi lapangan yang kemudian disusun sebagai pendukung penelitian guna mencapai tujuan yang diinginkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

3.1.1 Landasan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Secara garis besar UUBH mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi dan litigasi.

Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 merupakan turunan dari UUBH yang dibuat pemerintah guna keperluan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UUBH PP No. 42 Tahun 2013 yang diundangkan pada 23 Mei 2013. Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013. Permenkumham No. 22 Tahun 2013 ini diundangkan dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) dari PP No. 42 Tahun 2013. Hal menarik yang dibahas adalah mengenai standarisasi bantuan hukum yang didalamnya mengatur standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, standar pelaksanaan bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum dalam UU kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya UUBH jo. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu undang-undang peradilan umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Kemudian Pasal 68C menyebutkan pembentukan Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya inkrah.

Bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama termuat dalam Pasal 60B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara hukum, bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh negara dengan syarat melampirkan bukti tidak mampu. Selanjutnya dalam Pasal 60C yang menjelaskan Pos Bantuan Hukum dibentuk di tiap pengadilan agama untuk pelayanan bantuan hukum pada semua tingkat peradilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu hingga memperoleh putusan inkrah.

Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam UU No. 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk didampingi dan

diwakili oleh kuasa. Kemudian mangacu pada UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak mampu. Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma.

Bantuan hukum cuma-cuma dalam UU Advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum KUHAP diatur dalam Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP (Prodjohamidjojo, 1984).

3.1.2 Prinsip-prinsip Bantuan Hukum Non Ligitasi

Program kerja Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan keberadaan organisasi yaitu : (1) Al Quran dan As-Sunnah; (2) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah; (3) Nilai-nilai dasar 'Aisyiyah dan Persyarikatan, antara lain: (a) Mukadimah AD 'Aisyiyah dan Muhammadiyah; (b) Kepribadian Muhammadiyah; (c) Kittah Perjuangan Muhammadiyah; (d) Matan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah; (e) Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah dan pedoman lainnya.

Program kerja Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, yakni prinsip yang mendasarkan seluruh kegiatan dan tindakan pada kebaikan untuk seluruh umat dan mencegah setiap keburukan dan kedholiman yang merugikan dan menyengsarakan umat. Prinsip Hikmah, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi secara proporsional dan bijaksana, serta pendekatan yang menyejukkan.

Prinsip Keadilan dan Kebenaran, yakni prinsip yang mendasarkan setiap tindakan pada nilai-nilai islam, kepatutan, kejujuran serta keseimbangan. Prinsip Kemajuan dan Pemberdayaan, yakni prinsip yang mendasarkan setiap tindakan pada usaha-usaha untuk memberdayakan dan memajukan untuk mencapai tujuan gerakan. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas, yakni prinsip memperhitungkan asas-asas efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kemampuan, pelaksanaan yang tepat, ketersediaan dana dan personil dan menghindari *kejumbuan* (ketumpang-tindihan) dan pemborosan dalam pelaksanaan.

Prinsip Fleksibilitas, yakni prinsip gerak yang selalu memberi kemungkinan pada pengembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kepentingan setempat. Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan, yakni prinsip gerak dan kebijakan yang memprioritaskan program yang benar-benar memberi nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat secara luas.

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

3.1.3 Pelaksana Bantuan Hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d

UU Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8. LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Para aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin.

Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, paralegal, Dosen dan Mahasiswa FH yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat, dalam naskah ini khusus klien yang tidak mampu atau orang miskin. Dasar pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar PERADIN, menyatakan bahwasannya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka. Syarat standar pelaksana Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD, ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk Advokat.

3.1.4 Bantuan Hukum yang Diberikan

Bantuan hukum non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Adapun cara penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-Undang Nomor 30

tahun 1999 adalah: (1) Negosiasi, (2) Mediasi, (3) *Arbitrase*, (4) Penyuluhan Hukum, (5) Pemberdayaan Hukum

3.2 Kendala yang Dihadapi dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Non Litigasi

3.2.1 Masyarakat

Kendala yang datang dari masyarakat adalah kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga bantuan hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat: (1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, (2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, (3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik, (4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan (5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Masyarakat terkadang juga sulit mengakses bantuan hukum karena persyaratan administrasi, dalam hal ini surat keterangan tidak mampu. Masyarakat terkadang kesulitan mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu adalah persyaratan yang wajib ada untuk mendapatkan bantuan hukum.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam pengembangan dan pelaksanaan bantuan hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah mengakui sumber daya manusia terkadang menjadi salah satu faktor penghambat

pelaksanaan bantuan hukum. Keberadaan sumber daya manusia tentu akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan hukum.

Pada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, diakui bahwa terkadang kesulitan dalam hal perekrutan sumber daya manusia. Saat ini tercatat ada 14 advokat, 7 advokat kerjasama, dan 12 paralegal yang bekerja di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Meskipun begitu, sumber daya manusia tersebut masih dirasa cukup sehingga tidak ada kesulitan berarti.

Saat ini, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah masih sangat kekurangan sumber daya manusia terutama advokat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak ada penanganan litigasi yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Selain itu paralegal yang juga punya kesibukan lain juga mengurangi efektivitas pelaksanaan program non litigasi. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah pun diakui masih membutuhkan tenaga dalam hal perkara litigasi.

3.2.3 Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan pihak Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, mengakui bahwa sistem pendanaan saat ini masih belum sempurna. Syarat-syarat seperti adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) membuat pencairan dana tidak dapat langsung dilakukan. Selain itu Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah mengakui bahwa sistem pencairan dana secara *online* yang dibangun oleh BPHN belum sempurna. Sehingga dalam proses penanganan perkara, terkadang dana tidak sepenuhnya dapat ditutupi oleh lembaga tersebut. Masalah yang tak kalah penting adalah jenis pendanaan yang pukul rata. Hal ini membuat lembaga terkadang kesulitan dalam menalangi dana perkara, terutama yang melibatkan banyak pihak dan memiliki domisili yang jauh, karena perkara semacam ini membutuhkan lebih banyak biaya daripada perkara yang biasa.

Dalam pelaksanaan program non litigasi, lambatnya pencairan dana juga terjadi. Terlebih Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa

Tengah tidak mendapatkan dana khusus dari Fakultas maupun Universitas, sehingga dana dalam penyelenggaraan bantuan hukum hanya melalui usaha yang sifatnya swamandiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi, meliputi (a) UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; (b) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (c) UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, (d) UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (e) UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kendala yang Dihadapi dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Non Litigasi, yaitu: *pertama*, masyarakat, yakni kekurangtahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga bantuan hukum. Selama ini, bantuan hukum masih merupakan hal yang asing di tengah masyarakat, apalagi terkait dengan keberadaan lembaga bantuan hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat: (1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, (2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, (3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik, (4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, (5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal;

Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia terkadang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum. Keberadaan sumber daya manusia tentu akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan hukum. Pada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, diakui bahwa terkadang kesulitan dalam hal perekrutan sumber daya manusia.

Ketiga, anggaran. Permasalahan anggaran menjadi kendala utama dalam menjalankan bantuan hukum, meskipun saat ini biaya bantuan hukum diberikan oleh negara, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan di sana sini. Diakui bahwa sistem pendanaan saat ini masih belum sempurna. Syarat-syarat seperti adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) membuat pencairan dana tidak dapat langsung dilakukan, sehingga dalam proses penanganan perkara, terkadang dana tidak sepenuhnya dapat ditutupi oleh lembaga tersebut. Masalah yang tak kalah penting adalah jenis pendanaan yang pukul rata. Hal ini membuat lembaga terkadang kesulitan dalam menalangi dana perkara, terutama yang melibatkan banyak pihak dan memiliki domisili yang jauh, karena perkara semacam ini membutuhkan lebih banyak biaya daripada perkara yang biasa.

4.2 Saran

Pertama, untuk pemerintah. Hendaknya pemerintah terutama aparat penegak hukum memberi kemudahan dalam memfasilitasi bantuan hukum yang sifatnya non litigasi kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin mengetahui hak-hak dan kewajibannya di dalam hukum.

Kedua, untuk LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Hendaknya selalu mengedepankan hati nurani dalam memberikan bantuan hukum serta tidak memandang status sosial masyarakat yang diberikan bantuan hukum, sehingga lembaga ini dirasakan kehadirannya dan dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, untuk masyarakat. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan non litigasi lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang hukum sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara,

mengetahui persyaratan administrasi dan juga diharapkan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rival. dkk., 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Atmasasmita, Rombi. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A, Bardin.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- FOKUS (Forum Keadilan Untuk Semua), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua.pdf>, diunduh 29 November 2019, pukul 20.30 WIB.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, Diah Ratna Sari. 2014. *Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar*, Tesis, Denpasar: Universitas Udayana.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma..
- Kelompok Kerja Paralegal, *Working Paper: Kritisi RUUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta, hal. 25.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nusantara, Gede Agung Wirawan. 2011. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin pada Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.